



## Model Praktik Akuntansi UMKM Berbasis SAK-ETAP

Arina Hidayati<sup>1a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Selamat Sri

**Abstract.** Policy in applying accounting practice was one of the heavy tasks for UMKM. UMKM in Indonesia have implemented the system of accounting practice in accordance with SAK-ETAP (standard entity without accountability public) is not much more. Data from previous studies show eleven (11) from 19 UMKM still not use SAK-ETAP in recording transactions effort. The data indicates that the need for an accounting practices in accordance with SAK-ETAP to create UMKM. Through creativity UMKM is expected to increase one of the pillars of creative economy regions. The research is the kind of research literature study. Literature study is the kind of research take data from studies and journal-journal before. The result of research this illustrates model accounting practice UMKM based SAK-ETAP. Accounting practices of the model referred to consisting of recording manual and software accounting. Both the model researchers evaluation and minimize the difficulty of the accounting practice. Accounting practices the model UMKM based their SAK was or higher ETAP is expected to increase the creative economy.

**Keyword:** Accounting Practices, UMKM, SAK-ETAP

**Abstrak.** Kebijakan dalam menerapkan praktik akuntansi menjadi salah satu tugas yang berat bagi UMKM. Tidak banyak UMKM di Indonesia yang telah menerapkan system praktik akuntansi sesuai dengan SAK ETAP (Standar Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Data dari penelitian sebelumnya menunjukkan sebelas (11) dari 19 UMKM belum menggunakan SAK ETAP dalam pencatatan transaksi usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa perlunya praktik akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP untuk meningkatkan kreativitas UMKM. Melalui kreativitas UMKM tersebut diharapkan dapat meningkatkan salah satu pilar ekonomi kreatif daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur. Studi literatur merupakan jenis penelitian yang mengambil data dari penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal sebelumnya. Hasil dari penelitian ini menggambarkan model praktik akuntansi UMKM berbasis SAK ETAP. Model praktik akuntansi yang dimaksud terdiri dari pencatatan manual dan *software* akuntansi. Kedua model tersebut peneliti evaluasi sehingga meminimalisir tingkat kesulitan praktik akuntansi. Penerapan model praktik akuntansi UMKM berbasis SAK ETAP tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kreatif daerah.

**Kata Kunci:** Praktik Akuntansi, UMKM, SAK-ETAP

### A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan pada suatu bangsa.<sup>2</sup> Kontribusi peran UMKM tidak hanya terjadi pada negara-negara maju, bahkan negara berkembang seperti Indonesia juga mendapat pengaruh yang signifikan atas UMKM.<sup>3</sup> Fakta terbaru menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan dalam perekonomian nasional yang terhitung cukup besar yakni 99,9% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%.<sup>4</sup> Hasil kajian akademis lain menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM suatu negara

<sup>1</sup> **Korespondensi:** hidayatiarina93@gmail.com

<sup>2</sup> Ghartey, A. 1988. Antecedents and Significance of Accounting in Development: The case of Ghana. Accra: Ghana Universities Press

<sup>3</sup> Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas. (2016). Penguatan UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. *Warta KUMKM*. Vol 5-No. 1-2016.

<sup>4</sup> Putra, H.A., Kurniawati, E.P. (2012). *Penyusunan laporan keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Pekan Ilmiah Dosen FEB-UKSW, 14 Desember 2012.

menjadi barometer terhadap pertumbuhan PDB.<sup>5</sup> PDB adalah jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu.<sup>6</sup>

Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simongkir mengatakan secara jumlah, usaha kecil di Indonesia naik mencapai 93,4% dan usaha menengah 5,1%.<sup>7</sup> Namun berdasarkan penelitian Simongkir, angka tersebut menunjukkan bahwa angka usaha menengah masih sangat rendah dibanding usaha kecil. Dengan demikian Simongkir menyatakan bahwa tidak banyak terjadi perubahan pada usaha kecil yang “naik kelas”.

Kenaikan kelas UMKM menurut Kementerian PPN/Bappenas dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pendanaan dan pemasaran.<sup>8</sup> Kendala pendanaan terletak pada minimnya kepercayaan yang dimiliki lembaga keuangan untuk meminjamkan dana kepada UMKM. Lembaga keuangan hanya akan menyetujuiajuan kredit apabila UMKM menunjukkan laporan keuangan, melaporkan evaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, dan dapat memperhitungkan jumlah pajak yang ditanggung.<sup>9</sup> Namun pelaksanaan pembukuan dianggap hal sulit bagi UMKM dan cenderung tidak penting.<sup>10</sup> Berbagai keterbatasan ini disebabkan karena latar belakang pendidikan pengelola dan pemilik UMKM yang minim, sehingga tidak paham dengan akuntansi dan kurang disiplin dalam pencatatan keuangan.<sup>11</sup>

SAK ETAP muncul sebagai solusi bagi pemilik UMKM dalam mempraktikkan akuntansi yang memiliki standar di bawah standar akuntansi umum yakni PSAK. SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk pengguna yang memiliki usaha dan tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). SAK ETAP hanya boleh digunakan kepada entitas yang memiliki syarat berikut: (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan (2) Unit usaha yang memberikan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Diharapkan melalui kemudahan SAK ETAP, UMKM mampu melakukan pembukuan dan menyajikan laporan keuangan sehingga dapat memperluas kemungkinan pembiayaan dana dari luar.<sup>12</sup>

Kemampuan UMKM yang sangat rendah dalam praktik akuntansi menjadi salah satu tugas agar dibentuk model pencatatan akuntansi yang memudahkan masyarakat. Model pencatatan akuntansi tersebut dapat disebut sebagai jenis Ekonomi Kreatif (EK). Hal ini sesuai dengan Diktum Pertama Instruksi Presiden No.6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berbunyi EK adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, ketrampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Sanusi. 2015. Faktor Penentu Keberhasilan UMKM pada Kluster Bordir dan Konveksi Kudus. *Istishqa*. Vol.8. No.1 Maret 2015

<sup>6</sup> Mankiw N, Gregory, dkk. 2012, *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat

<sup>7</sup> Putra, H.A., Kurniawati, E.P. *Op.cit*

<sup>8</sup> Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas, *Op.Cit*.

<sup>9</sup> Warsono, S. dan E. Murti. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipaham dan Dipraktikkan*. Yogyakarta: Asgard Chapter Winarno.

<sup>10</sup> Savitri, R.V., Saifudin. (2018). Pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (studi pada UMKM MR. Pelangi Semarang). *Jurnal Manajemen dan Inovasi* Vol.5 No. 2 Juli 2018, Hal 117-125.

<sup>11</sup> Rudiantoro, R., Siregar, S.V. 2012. *Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK-ETAP*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9-No.1 Juni 2012.

<sup>12</sup> Timo Baas, Mechthild Schrooten. *Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis*. *Small Business Economics*, October 2006, Vol. 27, No. 2-3, hlm. 127-137



masyarakat Indonesia. Dengan demikian peneliti mengangkat judul Model Praktik Akuntansi UMKM Berbasis SAK-ETAP.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan utama yang terjadi pada UMKM di Indonesia yakni pendanaan. Faktor pendanaan dapat diminimalisir dengan cara memenuhi persyaratan lembaga pemberi dana. Salah satu syarat dari lembaga keuangan pemberi dana adalah menyediakan praktik akuntansi yang relevan, akurat dan efisien. Pencatatan keuangan yang relevan, akurat dan efisien dapat dilakukan dengan memenuhi standar SAK-ETAP. Dengan demikian penulis mengangkat bidang penelitian terkait dengan bagaimana model pencatatan akuntansi untuk UMKM berbasis SAK-ETAP.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kriteria UMKM**

Menurut UU Republik Indonesia No.20 Bab I Pasal 1 tahun 2008 mengenai Usaha Miko, Kecil dan Menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang sudah dimiliki, atau menjadi bagian langsung baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, bab 4, pasal 6, yaitu:

1. kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00

### **2. Praktik Akuntansi UMKM di Indonesia**

Di Bangladesh, hanya 13 dari total 30 usaha yang memiliki pengetahuan akuntansi, namun hanya 6 perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi dengan

benar.<sup>13</sup> perusahaan yang masih lemah dalam pengetahuan akuntansi justru berpendapat bahwa kebijakan akuntansi membutuhkan proses yang mahal dan ketrampilan teknis yang baik. Hal serupa terjadi pada UMKM di Indonesia. Perwakilan UMKM di Indonesia yang diambil 19 UMKM hanya 11 usaha yang mampu memahami akuntansi, itupun sangat sederhana.

Elisabeth, Nugroho dan Chandra Arifin membuktikan minimnya pengetahuan anggota UMKM yang mampu mempraktikkan akuntansi. 78,43% UMKM yang terdapat di Salatiga (Jawa Tengah) mencatat kas masuk dan kas keluar saja, karena terkait dengan pengetahuan pemilik usaha. Dan ada 19,5% UMKM yang mencatat penjualan, pembelian, biaya dan gaji. Namun seluruh UMKM tersebut hanya mempunyai catatan dan laporan tetapi belum ada yang membuat laporan keuangan. Laba dan rugi penjualan hanya dihitung berdasarkan selisih antara harga jual dan harga beli barang.<sup>14</sup>

Minimnya angka praktik akuntansi di kalangan UMKM dikarenakan oleh beberapa faktor berikut:

1. Rendahnya tingkat pendidikan

Secara garis besar kelemahan praktik akuntansi di UMKM dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan dan *overload* standar akuntansi yang dijadikan pedoman penyusunan pelaporan keuangan selama ini.<sup>15</sup>

2. Proses akuntansi membutuhkan biaya mahal

Perusahaan yang sudah melaksanakan proses akuntansi satu siklus tidak dapat menghindari pembiayaan gaji karyawan pada masing-masing bidang akuntansi yang dibutuhkan.

3. UMKM merasa kesulitan mengikuti standar SAK Umum

Melalui SAK ETAP diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Selain itu juga memudahkan entitas dalam melaksanakan praktik akuntansi melalui SAK ETAP yang lebih mudah.<sup>16</sup>

### 3. Model Akuntansi Berbasis SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sejak tanggal 17 Juli 2009, kemudian disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK IAI). Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan bagi UMKM dibandingkan dengan PSAK yang memiliki ketentuan pelaporan lebih kompleks.<sup>17</sup> Dengan demikian SAK ETAP mulai berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan.

---

<sup>13</sup> Uddin, R., Biswas. T., Ali J., Khatun, MS. 2017. *Accounting practices of small and medium enterprise in Bangladesh*. Journal of Business & Financial Affairs

<sup>14</sup> Elisabeth, Nugroho, Chandra Arifin, *Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol 10, No 2 (2012), hlm. 1

<sup>15</sup> Probosari, D. 2013. *Praktik akuntansi dan implikasinya pada kualitas informasi (sebuah studi pada UMKM)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.

<sup>16</sup> Rudiantoro, R., Siregar, S.V. *Op.Cit*.

<sup>17</sup> Lutfiaazahra, A. 2015. *Implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada UMKM pengrajin Batik di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis FKIP UNS.



SAK-ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.<sup>18</sup> Entitas tersebut tidak melaporkan keuangan kepada pihak ekstern dengan tujuan umum. Artinya entitas tidak melaporkan keuangan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses pengolahan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Namun SAK ETAP sebenarnya dapat digunakan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan jika otoritas berwenang mengizinkan.

Kebijakan SAK ETAP yang diterapkan dalam entitas dinilai lebih ringan dibanding dengan PSAK. Namun ketentuan transisi SAK ETAP cukup ketat. Hanya entitas yang memenuhi syarat SAK ETAP saja yang diperbolehkan menggunakan standar tersebut. Entitas tidak diperkenankan untuk menerapkan laporan keuangan dengan SAK ETAP apabila mengalami masa transisi usaha. Sebagai contoh sebuah perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP, namun pada periode selanjutnya perusahaan tersebut memilih mengganti menjadi perusahaan publik. Maka entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK non-ETAP dan tidak diperbolehkan menggunakan SAK ETAP kembali. Namun sebaliknya perusahaan yang memilih PSAK pada awal mendirikan usaha, dan kemudian memenuhi persyaratan entitas dapat menggunakan SAK ETAP, maka perusahaan tersebut dapat menggunakan SAK ETAP tersebut dalam penyusunan laporan keuangan.

Perbedaan utama antara PSAK umum dan SAK ETAP adalah terletak pada peraturan laporan keuangan yang lebih mudah. Adapun penyajian laporan keuangan pada akuntansi berbasis SAK ETAP memiliki syarat berikut :

**Tabel 1. Laporan Keuangan Berbasis SAK-ETAP**

No	Persyaratan Laporan Keuangan Berbasis SAK-ETAP	Penjelasan
1	Penyajian Wajar	Menyajikan laporan keuangan secara jujur sesuatu dengan transaksi yang terjadi
2	Kepatuhan terhadap SAK ETAP	Entitas memenuhi seluruh persyaratan dalam SAK ETAP
3	Kelangsungan hidup	Entitas tetap berdiri kecuali melikuidasi dan atau menghentikan operasi.
4	Frekuensi pelaporan	Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimal satu tahun sekali
5	Penyajian yang konsisten	Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten
6	Informatif komparatif	Informasi harus dilaporkan secara komparatif dengan periode sebelumnya
7	Materialitas dan Agregasi	Memisahkan pos-pos material dengan yang tidak material
8	Laporan keuangan lengkap	Laporan keuangan terdiri dari : Neraca, Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi

Sumber: Lutfiaazahr, 2015

<sup>18</sup> Putra, H.A., Kurniawati, E.P. Op.Cit.

## D. PENUTUP

### 1. Simpulan

Praktik akuntansi berbasis SAK-ETAP lebih banyak digunakan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. SAK ETAP dinilai lebih mudah dibandingkan dengan akuntansi berbasis PSAK umum. Namun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM terutama dalam hal laporan keuangan. Persyaratan laporan keuangan menjadi salah satu hal yang paling membedakan antara PSAK umum dan SAK ETAP. Melalui praktik akuntansi SAK ETAP yang diyakini lebih mudah, diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan memperoleh pendanaan dari bank.

### 2. Saran

Selama proses penyusunan makalah ini penulis mengalami sedikit kesulitan dalam menggali data terkait pencatatan akuntansi berbasis SAK ETAP. Seringkali peneliti sebelumnya mengungkapkan pencatatan akuntansi SAK ETAP sebatas pada laporan keuangan. Dengan demikian peneliti berharap semoga untuk peneliti selanjutnya mampu menambah cakupan pembahasan terkait pencatatan akuntansi SAK ETAP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*. London, UK: Penguin.
- Ghartey, A. (1988). *Antecedents and Significance of Accounting in Development: The case of Ghana*. Accra: *Ghana Universities Press*
- Direktorat Pengembangan UKM dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas. (2016). Penguatan UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. *Warta KUMKM*. Vol 5-No.1-2016. ISSN 2338-3747
- Putra, A.D. (2018, 6 Juli). *UMKM Sumbang 60 Persen ke Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Dikutip dari halaman <http://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.
- Sanusi. (2015). Faktor Penentu Keberhasilan UMKM pada Klaster Bordir dan Konveksi Kudus. *Istishqa*. Vol.8. No.1 Maret 2015
- Schwenk, C. R., & Schrader, C. (1993) Effects of Formal Strategic Planning on Financial Performance in Small Firms: A meat-analysis. *Entrepreneurship, Theory & Practice*, 17(3), 14-22.
- Uddin, R., Biswas, T., Ali J., Khatun, MS. (2017) Accounting practices of small and medium enterprise in Bangladesh. *Journal of Business & Financial Affairs*. ISSN: 2167-0234.
- Warsono, S. dan E. Murti. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahamidan Dipraktikkan*. Yogyakarta: Asgard Chapter Winarno.
- Savitri, R.V., Saifudin. (2018). Pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (studi pada UMKM MR. Pelangi Semarang). *Jurnal Manejmn dan Inovasi* Vol.5 No. 2 Juli 2018, Hal 117-125.
- Rudiantoro, R., Siregar, S.V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK-ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 9-No.1 Juni 2012.
- Lutfiaazahra, A. (2015). Implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada UMKM pengrajin Batik di Kampong Batik Laweyan Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis FKIP UNS*. ISBN 978-602-8580-19-9.



Baas, T. dan M. Schrooten. 2006. Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis. *Small Business Economics*, 27

Probosari, D. (2013). *Praktik akuntansi dan implikasinya pada kualitas informasi (sebuah studi pada UMKM)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.

Putra, H.A., Kurniawati, E.P. (2012). *Penyusunan laporan keuangan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. *Pekan Ilmiah Dosen FEB-UKSW*, 14 Desember 2012.

Binus University. (2012). *Pilar-Pilar Ekonomi Kreatif. Rangkaian Kolom Kluster I*, 2012.